

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

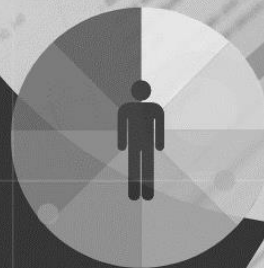
KOTA PAGAR ALAM
2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA PAGAR ALAM**

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KOTA PAGAR ALAM
2021





INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA PAGAR ALAM 2021

No. Publikasi : 16730.2113
Katalog : 4102004.1673
Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm
Jumlah Halaman : xv + 58 halaman

Naskah:
Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam

Penyunting:
Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam

Gambar Kulit:
Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam

Diterbitkan oleh:
©Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam

Sumber Ilustrasi :
canva.com
freepik.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasi, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik



TIM PENYUSUN

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA PAGAR ALAM 2021

Pengarah:

Dedi Fahlevi

Penanggung Jawab:

Ummi Suciati

Penyunting:

Ummi Suciati

Penulis:

Eka Nurhidayati

Tata Letak:

Eka Nurhidayati

Desain Cover:

Eka Nurhidayati

Infografis:

Eka Nurhidayati

KATA PENGANTAR

Publikasi “Indikator Kesejahteraan Rakyat Pagar Alam Tahun 2020” memuat berbagai data dan informasi tentang perkembangan kondisi kesejahteraan masyarakat Kota Pagar Alam yang disajikan dalam bentuk indikator kuantitatif bidang sosial.

Melalui data dan indikator sosial tersebut akan dapat diketahui gambaran mengenai perubahan kondisi kesejahteraan masyarakat sebagai dampak dari hasil pembangunan sosial dan ekonomi di Kota Pagar Alam. Informasi ini sangat diperlukan sebagai bahan evaluasi capaian program pembangunan yang telah dilaksanakan, sekaligus sebagai acuan untuk membuat berbagai perencanaan pembangunan sosial ekonomi di masa yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini, disampaikan terima kasih. Semoga data yang disajikan dalam publikasi ini dapat memenuhi semua keinginan para pengguna data. Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak merupakan masukan yang berharga guna perbaikan publikasi ini di masa yang akan datang.

Pagar Alam, Desember 2021

Kepala Badan Pusat Statistik

Kota Pagar Alam



Dedi Fahlevi

<https://pagaralamkota.bps.go.id>

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
METODOLOGI.....	x
BAB I KEPENDUDUKAN DAN KB	2
BAB II KESEHATAN DAN GIZI	10
BAB III PENDIDIKAN.....	16
BAB IV KETENAGAKERJAAN	26
BAB V TARAF DAN POLA KONSUMSI	36
BAB VI PERUMAHAN DAN SANITASI	44
BAB VII KEMISKINAN	50
BAB VIII ASPEK SOSIAL LAINNYA	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan, dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Pagar Alam, 2016-2020	4
Tabel 1.2 Jumlah dan Persentase Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Pagar Alam Tahun 2020	6
Tabel 2.1 Persentase Wanita berumur 10 tahun ke atas menurut status perkawinan	7
Tabel 2.2 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun ke Atas menurut Status Perkawinan.....	7
Tabel 2.3 Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Pernah Mendapat Imunisasi menurut Jenis Imunisasi, 2019-2020	13
Tabel 3.1 Persentase Penduduk Kota Pagar Alam Berusia 15+ Menurut Kemampuan Baca Tulis (Melek/Buta Huruf) dan Kelompok Umur, 2019-2020.....	17
Tabel 3.2 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan, 2016-2020	19
Tabel 3.3 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur, 2016-2020.....	20
Tabel 3.4 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan, 2016-2020	21
Tabel 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin, 2017-2020.....	28
Tabel 4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin, 2017-2020.....	30
Tabel 4.3 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama, 2017-2020	31
Tabel 4.4 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, 2020	32
Tabel 4.5 Persentase Penduduk yang Bekerja Kurang dari 35 Jam seminggu, 2020	33
Tabel 5.1 Persentase Pengeluaran Per Kapita Masyarakat, 2016-2020.....	37
Tabel 5.2 Distribusi Pembagian Pengeluaran Masyarakat dan Gini Rasio, 2016-2020.....	38
Tabel 5.3 Konsumsi Energi, Protein Per Kapita Per Hari, dan Rata-Rata Konsumsi per Kapita, 2016-2020	39
Tabel 5.4 Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang Makanan Penduduk Kota Pagar Alam (Rupiah), 2020.....	40
Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2016-2020	45
Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Fasilitas Perumahan, 2016-2020	46

Tabel 6.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal, 2016-2020	47
Tabel 7.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Kota Pagar Alam, 2016-2020	51
Tabel 7.2 Perkembangan Indikator Kemiskinan Di Kota Pagar Alam, 2016-2020.....	52
Tabel 8.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Akses Terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi, 2016-2020	56
Tabel 8.2 Persentase Rumah Tangga menurut jenis program perlindungan sosial yang diterima, 2018-2020	58

<https://pagaralamkota.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Kota Pagar Alam Tahun 2016-2020.....	3
Gambar 1.2 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Pagar Alam Tahun 2020-2025	4
Gambar 3.1 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kota Pagar Alam, 2016-2020.....	18
Gambar 3.2 Perkembangan Rasio Murid-Guru Tahun Ajaran, 2016-2020	22
Gambar 3.3 Perkembangan Rasio Murid-Sekolah Tahun Ajaran 2016-2020.....	23
Gambar 4.1 Diagram Ketenagakerjaan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	27

METODOLOGI

Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan adalah data yang berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Meskipun data Susenas dan Sakernas mencakup berbagai aspek kesejahteraan rakyat, beberapa indikator penunjang dapat diperoleh melalui sumber-sumber lain khususnya dari Pagar Alam Dalam Angka.

Konsep dan Definisi

Metode analisis yang digunakan pada penyusunan indikator-indikator adalah dengan analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Konsep serta definisi dari indikator-indikator yang digunakan disajikan di bawah ini.

Kependudukan

- a. **Penduduk** adalah setiap orang yang menetap di suatu wilayah selama enam bulan atau lebih dan atau yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap lebih dari enam bulan
- b. **Laju Pertumbuhan Penduduk** adalah persentase perubahan penduduk dalam periode tertentu (biasanya setahun). Formula yang digunakan adalah:

$$P_t = P_0(1 + r)^t$$

P_t adalah jumlah penduduk pada tahun t

P_0 adalah jumlah penduduk pada tahun dasar

R adalah laju pertumbuhan penduduk

- c. **Kepadatan penduduk** adalah jumlah penduduk di suatu wilayah dibagi dengan luas wilayah yang bersangkutan. Formula yang digunakan adalah:

$$\text{Kepadatan penduduk} = \frac{\text{Jumlah penduduk suatu wilayah (jiwa)}}{\text{Luas wilayah yang bersangkutan (km}^2\text{)}}$$

- d. **Rasio jenis kelamin** adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Formula yang digunakan adalah:

$$\text{Rasio jenis kelamin} = \frac{\text{Jumlah penduduk laki-laki}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100$$

Kesehatan

- a. **Angka Harapan Hidup (AHH)** adalah perkiraan rata-rata hidup (dalam tahun) dari lahir yang dapat ditempuh oleh seseorang.
- b. **Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan** adalah rasio antara banyaknya penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dibagi dengan jumlah penduduk pada waktu tertentu.
- c. **Angka Kesakitan** adalah rasio antara banyaknya penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan terganggu kegiatan sehari-hari dibagi dengan jumlah penduduk.
- d. **Rata-Rata Lama Sakit** adalah rata-rata lamanya terganggu kesehatan (dalam hari) yaitu terganggunya kegiatan/aktivitas sehari-hari bagi seseorang yang mengalami keluhan kesehatan.
- e. **Persentase persalinan oleh tenaga medis** adalah rasio banyaknya persalinan yang ditolong oleh tenaga medis (dokter, paramedis, bidan, dan perawat) terhadap seluruh persalinan yang terjadi pada saat tertentu.

Pendidikan

- a. **Bersekolah** adalah terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar di suatu jenjang pendidikan formal baik yang di bawah pengawasan Depdiknas maupun departemen/instansi lain.
- b. **Angka Melek Huruf (AMH)** adalah jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya dengan jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas. Formula yang digunakan adalah:

$$\text{AMH} = \frac{\text{Penduduk 15 tahun ke atas yang melek huruf}}{\text{Penduduk usia 15 tahun ke atas}} \times 100$$

- c. **Rata-rata Lama Sekolah (*Mean Years of Schooling/MYS*)** adalah rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk dewasa (15 tahun ke atas) di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalannya. *MYS* dihitung dengan menggunakan 3 variabel secara simultan yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani, dan jenjang pendidikan yang ditamatkan.
- d. **Angka Partisipasi Sekolah (*APS*)** adalah perbandingan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu yang masih sekolah dengan jumlah seluruh penduduk pada kelompok usia yang bersesuaian. Formula yang digunakan adalah:

$$APSi = \frac{\text{Jumlah penduduk yang bersekolah}_i}{\text{Jumlah penduduk}_i} \times 100$$

i adalah kelompok usia: 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun

Ketenagakerjaan

- a. **Bekerja** adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji termasuk semua tunjangan dan bonus bagi pekerja/karyawan/pegawai dan hasil usaha berupa sewa atau keuntungan, baik berupa uang atau barang termasuk bagi pengusaha.
- b. **Menganggur** adalah keadaan seseorang dimana selama seminggu lalu (dari masa pencacahan) tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang berusaha mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha atau sudah diterima tetapi belum mulai bekerja atau putus asa dalam mencari pekerjaan.
- c. **Angkatan Kerja (*AK*)** adalah mereka yang selama seminggu yang lalu (dari masa pencacahan) mempunyai pekerjaan baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja (karena sakit, cuti, dan sebagainya) serta mereka yang sedang menganggur.
- d. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (*TPAK*)** adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja (umur 15 tahun ke atas). Formula yang digunakan yaitu:

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia kerja (15+)}} \times 100$$

- e. **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** adalah perbandingan antara penduduk usia kerja yang menganggur (tidak mempunyai pekerjaan dan sedang berusaha mencari kerja atau sedang mempersiapkan usaha atau sudah diterima tetapi belum mulai bekerja) terhadap jumlah penduduk usia kerja yang masuk dalam angkatan kerja. Formula yang digunakan yaitu:
- $$TPT = \frac{\text{Jumlah Penduduk yang menganggur}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100$$
- f. **Jumlah jam kerja** adalah lama waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja dari seluruh pekerjaan yang dilakukan selama seminggu terakhir.
- g. **Lapangan usaha/pekerjaan** adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat responden bekerja atau yang dihasilkan oleh perusahaan/kantor tempat responden bekerja.
- h. **Status pekerjaan** adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan meliputi berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar.

Taraf dan Pola Konsumsi

- a. **Konsumsi/pengeluaran** (makanan maupun bukan makanan) adalah nilai pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga baik berasal dari pembelian, produksi sendiri atau pemberian. Untuk konsumsi yang berasal dari produksi sendiri atau pemberian, nilainya diperhitungkan sesuai dengan harga pasar setempat.
- b. **Penduduk miskin** adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran rumah tangga sebulan di bawah garis kemiskinan.
- c. **Garis Kemiskinan** adalah nilai rupiah yang dibutuhkan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar selama sebulan yaitu 2100 kkal/kapita/hari ditambah kebutuhan dasar non makanan khususnya untuk pangan dan papan.
- d. **Gini Ratio** adalah salah satu ukuran ketimpangan pendapatan dimana nilainya berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Semakin mendekati 0 (nol) ketimpangan pendapatan semakin rendah dan semakin mendekati 1 (satu) ketimpangan pendapatan semakin tinggi. Rumus yang digunakan adalah:

$$G = \left| 1 - \sum_{k=1}^n (X_k - X_{k-1})(Y_k + Y_{k-1}) \right|$$

X_k adalah kumulatif proporsi penduduk

$$X_k = \frac{\sum_{m=1}^k X_m}{\sum X}$$

Dimana $k=0, \dots, n$; $X_0 = 0$; $X_n = 1$

Y_k adalah kumulatif proporsi pendapatan

$$Y_k = \frac{\sum_{m=1}^k Y_m}{\sum Y}$$

Dimana $k=0, \dots, n$; $Y_0 = 0$; $Y_n = 1$

Perumahan dan Sanitasi

- a. **Luas lantai** adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap). Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam perhitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, lantai jemur (hamparan semen), dan ruangan khusus untuk usaha (misalnya warung).
- b. **Atap layak** adalah atap selain daun-daunan yaitu beton, genteng, sirap, seng, dan asbes.
- c. **Dinding permanen** adalah dinding yang terbuat dari susunan bata merah atau batako (dinding termbok) dan dinding kayu.
- d. **Air bersih** adalah sumber air minum yang berasal dari air ledeng, air kemasan dan air isi ulang atau yang berasal dari popma/sumur/mata air terlindung dengan jarak ke tempat pembuangan limbah lebih dari 10 meter.

Jamban sehat (sanitasi layak) adalah jamban/kakus yang digunakan oleh rumah tangga responden sendiri serta dilengkapi tangki pembuangan (tangki septik).

<https://pagaralamkota.bps.go.id>

BAB I

KEPENDUDUKAN DAN KB

143.844

JUMLAH PENDUDUK
KOTA PAGAR ALAM

Data Sensus Penduduk 2020



Dari 100 penduduk perempuan,
ada sekitar 105 penduduk perempuan



7 dari 10 penduduk perempuan
berumur 10 tahun ke atas sudah
melakukan perkawinan pertama

Jumlah penduduk yang besar berarti lebih banyak kebutuhan akan fasilitas dasar seperti tempat tinggal, sekolah dan rumah sakit.

BAB I

KEPENDUDUKAN DAN KB

Kajian mengenai kependudukan yang menjadi fokus bahasan antara lain meliputi, jumlah penduduk, komposisi, dan distribusi penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan modal dasar pembangunan, meskipun seringkali dapat menjadi beban dalam proses pembangunan itu sendiri. Pemerintah sebaiknya tidak hanya menitikberatkan pada program pengendalian jumlah penduduk saja, namun juga hendaknya mempercepat pembangunan kualitas penduduk berupa pembangunan kualitas sumber daya manusia. Di samping itu juga program perencanaan pembangunan sosial di segala bidang terutama yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan penduduk. Hal ini disebabkan karena kondisi kependudukan atau demografi merupakan komponen indikator yang sangat penting karena menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia seperti sandang, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, maupun lingkungan. Oleh karena itu, kajian kependudukan menjadi focus utama dalam melihat kesejahteraan masyarakat.

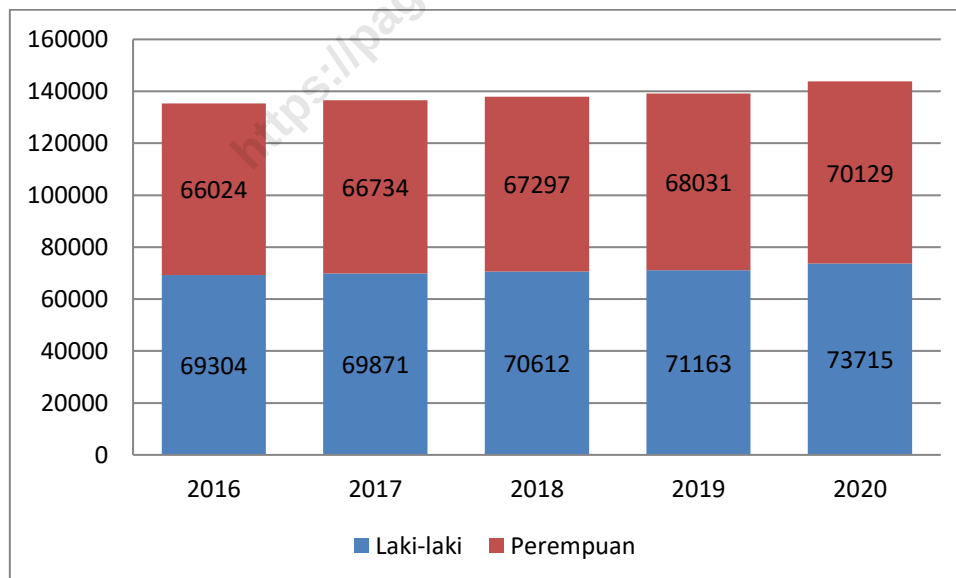
Masalah kependudukan yang menjadi fokus bahasan antara lain meliputi jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk yang merupakan masalah yang perlu diperhasitkan dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar pembangunan jika mempunyai kualitas yang baik. Namun sebaliknya jika jumlah penduduk tidak sejalan dengan peningkatan kualitasnya maka akan menjadi boomerang tersendiri untuk pembangunan.

Pengendalian jumlah penduduk diperlukan untuk mencegah ledakan penduduk yang dapat berdampak buruk pada kesejahteraan rakyat. Jumlah penduduk yang besar berarti lebih banyak kebutuhan akan fasilitas dasar yang harus disediakan seperti tempat tinggal, sekolah dan rumah sakit. Pemerintah perlu mempersiapkan sarana dan prasarana tersebut untuk menjamin kebutuhan dasar seluruh rakyat tercukupi. Selain itu juga semakin besar jumlah penduduk, semakin besar juga lapangan pekerjaan yang harus disiapkan agar tidak menjadi beban pembangunan.

Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin

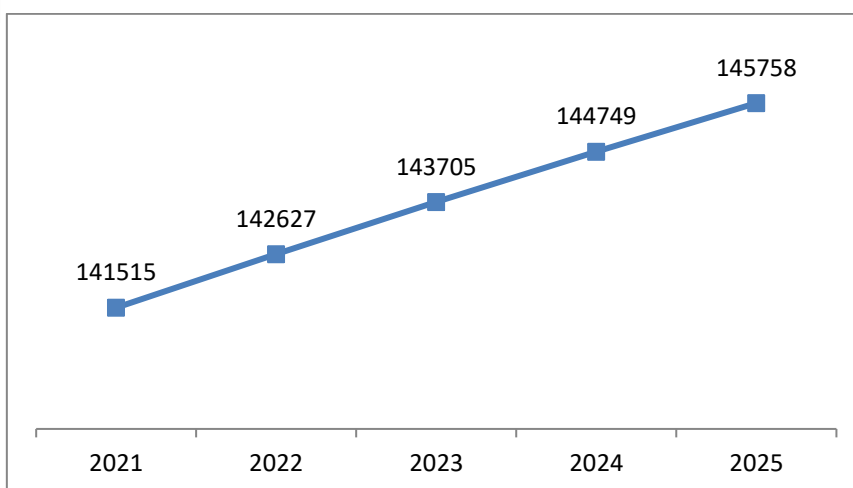
Jumlah penduduk suatu wilayah dapat dihitung melalui sensus (pencacahan penduduk) atau proyeksi. Pelaksanaan kegiatan sensus membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar, sehingga saat ini Indonesia baru mampu melaksanakannya setiap 10 tahun sekali. Untuk itu, data proyeksi saat ini masih menjadi andalan sebagai data penunjang pembangunan. Pada tahun 2020 ini, BPS kembali mengadakan kegiatan sensus penduduk. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Kota Pagar Alam tahun 2020 berjumlah sebanyak 143.844 jiwa, yang terdiri dari 73.715 jiwa penduduk laki-laki dan 70.129 jiwa penduduk perempuan. Jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2016, dimana jumlah penduduk sebesar 135.328 jiwa maka dalam kurun waktu 5 tahun terakhir jumlah penduduk pagar alam tumbuh sebesar 6,29 persen atau bertambah sebanyak 8.516 jiwa. Pertumbuhan jumlah penduduk ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, selain sebagai konsekuensi logis dari kejadian kelahiran dan kematian alami, juga dipengaruhi oleh faktor perpindahan penduduk baik penduduk yang datang (migrasi masuk) maupun penduduk yang pergi (migrasi keluar). Pertambahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun selama 5 tahun terakhir ditampilkan pada Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Kota Pagar Alam Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kota Pagar Alam

Gambar 1.2 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Pagar Alam Tahun 2020-2025



Sumber: BPS Kota Pagar Alam

Melalui data hasil Sensus Penduduk 2020, kemudian dapat dihitung proyeksi jumlah penduduk untuk beberapa tahun ke depan. Pada Gambar 1.2 di atas ditampilkan proyeksi jumlah penduduk Kota Pagar Alam dari tahun 2021 sampai 2025. Dalam 5 tahun ke depan, diproyeksikan penduduk Kota Pagar Alam akan berjumlah sekitar 145.758 jiwa. Angka proyeksi ini dapat menjadi acuan pemerintah untuk membuat perencanaan pembangunan fasilitas penunjang seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dan lainnya.

Tabel 1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan, dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Pagar Alam, 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	laju Pertumbuhan Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	135.328	1,10	104,97
2017	136.605	0,94	104,70
2018	137.909	0,95	104,93
2019	139.194	0,93	104,60
2020	143.844	3,34	105,11

Sumber: BPS Kota Pagar Alam

Laju pertumbuhan penduduk menjadi salah satu indikator yang digunakan dalam perhitungan proyeksi jumlah penduduk. Laju pertumbuhan penduduk selama 5 tahun

terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.1 Pada tahun 2017 jumlah penduduk Kota Pagar Alam bertambah 1.277 jiwa, tahun 2018 laju pertumbuhannya meningkat dan penduduk bertambah sebanyak 1.304 jiwa. Selanjutnya pada 2019 pertumbuhannya melambat dan hanya bertambah sebesar 1.285 jiwa, dan pada tahun 2020 kembali meningkat dan bertambah sebesar 4.650 jiwa.

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat memberikan gambaran struktur penduduk suatu wilayah. Menurut teori demografi, pada awal-awal tahun kelahiran, secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Melalui proses demografi, penduduk laki-laki biasanya cenderung lebih rentan dalam hal kesehatan dan memiliki angka harapan hidup yang lebih rendah dibanding penduduk perempuan. Di sisi lain penduduk laki-laki memiliki tingkat mobilitas yang lebih tinggi dari perempuan terkait aktivitasnya untuk bersekolah atau mencari pekerjaan di tempat lain. Proses demografi tersebut berfluktuasi menurut kelompok umur. Pada Tabel 1, diperlihatkan bahwa rasio jenis kelamin penduduk Kota Pagar Alam tahun 2020 adalah 105,11 yang artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan (dari setiap 100 orang penduduk perempuan, ada sekitar 105 orang penduduk laki-laki). Dengan demikian, jumlah penduduk laki-laki dikatakan lebih banyak dibanding penduduk perempuan.

Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Data persebaran penduduk antara lain berguna untuk melihat tingkat pemerataan/ketimpangan distribusi penduduk antar wilayah, untuk melihat potensi jumlah sumber daya manusia di suatu wilayah, dan untuk melihat potensi daya dukung sumber daya alam terhadap jumlah penduduk.

Penduduk Kota Pagar Alam tersebar acak dalam 5 kecamatan. Kepadatan penduduk Kota Pagar Alam tahun 2020 adalah sebesar 227 penduduk/km². Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Pagar Alam Selatan yaitu 797 penduduk/km², dimana Kecamatan Pagar Alam Selatan merupakan kecamatan dengan persentase jumlah penduduk terbanyak di Kota Pagar Alam yaitu sebesar 35,01 persen. Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Dempo Selatan yang hanya sebesar 52 penduduk/km², hal ini dikarenakan wilayah Kecamatan Dempo Selatan merupakan kecamatan terluas namun memiliki jumlah penduduk yang

paling sedikit yaitu hanya sekitar 8,89 persen. Sementara itu untuk data pada kecamatan lain dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Jumlah dan Persentase Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Pagar Alam Tahun 2020

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase (%)	Luas Daerah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dempo Selatan	12.783	8,89	243,86	52,42
Dempo Tengah	14.749	10,25	144,05	102,39
Dempo Utara	23.031	16,01	127,11	181,19
Pagar Alam Selatan	50.361	35,01	63,17	797,23
Pagar Alam Utara	42.920	29,84	55,47	773,75
Kota Pagar Alam	143.844	100	633,66	227,01

Sumber: BPS Kota Pagar Alam

Dari Tabel 1.2 dapat dilihat persebaran penduduk Kota Pagar Alam masih belum merata. Penduduk Kota Pagar Alam terpusat pada 2 kecamatan yang luasnya lebih kecil dari 3 kecamatan lainnya, sehingga meningkatkan kepadatan penduduk pada 2 kecamatan tersebut. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena fasilitas pendidikan, kesehatan, perekonomian maupun perumahan juga terfokus pada 2 kecamatan tersebut. Melalui data ini pemerintah diharapkan mampu melakukan pembangunan yang lebih merata pada setiap kecamatan yang ada, sehingga di masa yang akan datang persebaran penduduk dapat lebih merata.

Wanita Menurut Usia Perkawinan Pertama

Usia perkawinan pertama seorang wanita sangat memengaruhi resiko melahirkan. Pada usia perkawinan pertama yang terlalu muda atau terlalu tua, semakin besar resiko yang dihadapi selama masa kehamilan/melahirkan, baik bagi keselamatan ibu maupun anak. Hal ini dikarenakan belum matangnya organ reproduksi wanita usia muda untuk proses berkembangnya janin, dan juga belum siapnya mental dalam menghadapi masa kehamilan maupun melahirkan. Demikian pula sebaliknya, semakin tinggi usia perkawinan pertama

dari usia yang dianjurkan dalam program Keluarga Berencana, juga semakin tinggi resiko yang dihadapi dalam masa kehamilan/melahirkan.

Tabel 1.3 Persentase Wanita berumur 10 tahun ke atas menurut status perkawinan

Tahun	Belum Kawin	Kawin	Cerai
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	26,71	62,10	11,19
2019	25,66	62,75	11,59
2020	26,92	60,56	12,52

Sumber: Susenas BPS (diolah)

Pada tahun 2020 di Kota Pagar Alam, secara umum terdapat sekitar 73 persen wanita di atas 10 tahun sudah melakukan perkawinan pertama, 62 persen diantaranya masih berstatus kawin sedangkan 11 persen lainnya berstatus cerai. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu 74 persen.

Tabel 1.4 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun ke Atas menurut Status Perkawinan

Tahun	Belum Kawin	Kawin	Cerai
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	24,04	72,06	3,90
2019	23,06	72,80	4,15
2020	24,61	70,98	4,42

Sumber: Susenas BPS (diolah)

Sementara itu 75,4 persen wanita berumur 15-49 persen sudah melakukan perkawinan pertama, 70,98 persen diantaranya masih berstatus kawin dan 4,42 persen berstatus cerai. Angka ini juga menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu 76,95 persen. Meskipun mayoritas wanita melakukan perkawinan pertama pada umur 15-49 tahun, namun perlu menjadi perhatian juga bahwa persentase wanita berumur 10 tahun ke atas cukup banyak. Ini berarti masih ada penduduk wanita yang melakukan perkawinan pertama pada umur 10-14 tahun dan lebih dari 49 tahun, padahal pada umur tersebut resiko gangguan pada kehamilan maupun persalinan lebih tinggi dibandingkan pada umur yang dianjurkan yaitu 15-49 tahun. Hal ini perlu diperhatikan agar resiko yang



dapat ditimbulkan akibat perkawinan dini baik dari segi kesehatan maupun sosial dapat dikurangi.

<https://pagaralamkota.bps.go.id>

BAB II

KESEHATAN DAN GIZI

Angka Kesakitan 2020

17,42 persen

Meningkat dibandingkan 2019,
salah satu faktor penyebabnya adalah pandemi covid-19



33,59 persen

penduduk usia 15 tahun ke atas merokok
dengan jumlah rata-rata per batang per hari

88

batang



96,27 persen

bayi berusia 0-23 bulan pernah diberikan ASI
dengan rata-rata lama pemberian ASI selama

6

bulan



Terjaminnya kesehatan masyarakat adalah modal utama untuk keberhasilan pembangunan di daerah. Baik sehat secara jasmani maupun rohani

BAB II

KESEHATAN DAN GIZI

Kesehatan merupakan salah satu faktor yang menentukan kesejahteraan masyarakat. Manusia yang sehat baik mental maupun fisik akan mampu berperan lebih baik dalam pembangunan dan dapat menghasilkan produktivitas kerja yang tinggi sehingga pada akhirnya akan berpengaruh pada taraf kesejahteraannya.

Upaya peningkatan kesehatan telah banyak dilakukan pemerintah melalui penyediaan berbagai fasilitas umum seperti puskesmas, pustu, posyandu, pos obat desa, serta penyediaan fasilitas air bersih. Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Hal ini terkait aspek kesehatan merupakan modal yang sangat berpengaruh bagi kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaku pembangunan. Sasaran pembangunan kesehatan tersebut adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan yang makin menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Status kesehatan penduduk memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk dan biasanya dapat dilihat melalui indikator persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan angka kesakitan. Morbiditas atau angka kesakitan merupakan salah satu indikator untuk mengetahui derajat kesehatan suatu wilayah. Angka kesakitan menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya.

Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/sesak napas, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di suatu wilayah dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang

menderita sakit). Hasil Susenas tahun 2020 menunjukkan angka kesakitan Kota Pagar Alam sebesar 17,42 persen dimana hal tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 13,91 persen.

Upaya pemerintah dalam memberikan kemudahan masyarakat mengakses fasilitas kesehatan pada tahun 2020 menunjukkan keberhasilan. Terlihat dalam setahun terakhir berdasarkan Susenas 2020 menunjukkan bahwa persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan berobat jalan menggunakan jaminan kesehatan dalam sebulan terakhir sebesar 76,02 persen, angka ini naik dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 14,78 persen.

Selain angka kesakitan, indikator kesehatan masyarakat lainnya adalah kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok masyarakat Kota Pagar Alam pada tahun 2020 tampaknya masih cukup tinggi. Sebanyak 33,59 persen dari penduduk berumur diatas 15 tahun merokok, dengan rata-rata jumlah rokok yang dihisap per minggu mencapai 88 batang. Hal ini tentu dapat menjadi suatu peringatan akan meningkatnya angka kesakitan, karena seperti yang sudah diketahui bahwa kebiasaan merokok merupakan salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya resiko sakit.

Tingkat Imunitas dan Gizi Balita

Kurang gizi merupakan salah satu ancaman serius bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan suatu bangsa. Hal ini menjadi masalah karena adanya beban jumlah anak kurang gizi yang cukup besar akan mengganggu proses tumbuh kembangnya yang juga akan berakibat pada penyerapan pelajaran di sekolah yang nantinya akan ber[engaruh terhadap pencapaian prestasi. Dengan demikian, permasalahan kurang gizi ini menjadi salah satu masalah penting yang harus diselesaikan pemerintah demi mendapatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di masa yang akan datang.

Peranan seorang ibu dalam proses tumbuh kembang anak sangatlah penting. Pemenuhan kebutuhan akan gizi seorang anak telah dimulai sejak masa kehamilan sampai setelah melahirkan. Pemberian Air Susu Ibu (ASI) sangat dianjurkan untuk diberikan pada anak karena ASI merupakan makanan pertama yang memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak. Oleh sebab itu, pemerintah mengajurkan agar seorang ibu dapat



memberikan ASI eksklusif kepada anak sejak dilahirkan sampai berumur 6 bulan, tanpa menambahkan atau mengganti makanan/minuman lain. Setelah anak berusia 6 bulan ke atas kemudian dilanjutkan bersama dengan makanan tambahan dan ASI tetap diberikan hingga usia 2 tahun. Sehubungan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030, menyusui juga merupakan salah satu langkah pertama seorang manusia untuk mendapatkan kehidupan yang sehat dan sejahtera.

Berdasarkan Susenas 2020, sebanyak 96,27 persen bayi berumur 0-23 bulan pernah diberi ASI dengan rata-rata lama pemberian ASI hanya selama 12 bulan. Sangat disayangkan bahwa hal ini belum sesuai dengan anjuran pemerintah bahwa ASI sebaiknya diberikan hingga anak mencapai umur 2 tahun. Hal ini ditakutkan akan menimbulkan dampak pada meningkatnya kerentanan anak terhadap penyakit (baik anak maupun ibu), serta berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan anak karena kurangnya gizi yang diterima. Selain itu juga dapat memberikan kerugian kognitif, karena ASI eksklusif dapat meningkatkan IQ anak, potensi mendapatkan pekerjaan yang lebih baik karena memiliki fungsi kecerdasan tinggi. Tentunya hal ini akan meningkatkan potensi mendapatkan penghasilan yang lebih optimal.

Selain ASI, faktor penting yang juga meningkatkan tumbuh kembang anak adalah imunisasi. Pemberian imunisasi dapat memberikan kekebalan pada anak terhadap penyakit. Kementerian Kesehatan menganjurkan agar semua anak-anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari beberapa penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan kepada orang di sekitarnya. Adapun jenis imunisasi yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, DPT, Polio, Campak/MMR serta Hepatitis B.

Berdasarkan Tabel 2.1, program imunisasi dasar di Kota Pagar Alam sudah berjalan baik, namun pada beberapa jenis masih rendah tingkat partisipasinya. Imunisasi untuk BCG, DPT, Polio dan Hepatitis B sudah cukup tinggi tingkat partisipasinya, yaitu di atas 80 persen. Namun untuk jenis imunisasi Campak/Morbili masih terlihat cukup rendah yaitu sebesar 78,80 persen. Dalam pemberian imunisasi, persentase penduduk berumur 0-59 bulan (balita) yang memiliki kartu imunisasi sudah mencapai 89,23 persen pada tahun 2020,

namun persentase balita yang pernah mendapat imunisasi secara lengkap hanya 53,81 persen saja.

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Pernah Mendapat Imunisasi menurut Jenis Imunisasi, 2019-2020

Tahun	Jenis Imunisasi				
	BCG	DPT	Polio	Campak/Morbili	Hepatitis B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2019	96,06	91,23	96,31	72,05	85,81
2020	90,85	88,77	91,83	78,80	87,86

Sumber: Susenas (BPS) 2019-2020

Kondisi ini perlu diperhatikan karena pemberian imunisasi lengkap sangat bermanfaat untuk tumbuh kembang anak. Selain menghindarkan resiko penyakit berbahaya bagi anak juga melindungi lingkungan sekitar dari resiko tertular penyakit. Partisipasi masyarakat yang masih rendah terhadap imunisasi ini juga tak lepas dari mitos yang beredar di masyarakat mengenai efek samping imunisasi, serta kurangnya pengetahuan orang tua mengenai pentingnya imunisasi ini. Hal ini menjadi tugas bersama terutama pemerintah untuk memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya imunisasi, serta meyakinkan para orang tua bahwa imunisasi aman untuk balita, karena kesehatan anak sebagai generasi penerus merupakan modal penting untuk melanjutkan estafet cita-cita pembangunan.



<https://pagaralamkota.bps.go.id>

BAB III

PENDIDIKAN

Angka Melek Huruf 2020

99,24 persen

0,76 persen sisanya buta huruf,
didominasi oleh penduduk berumur 50+



Rata-rata Lama Sekolah



Rasio Murid-Sekolah

SD	SMP	SMA
165	302	451

Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan antara lain ditandai oleh menurunnya jumlah penduduk buta huruf; meningkatnya secara nyata persentase penduduk yang menyelesaikan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan pendidikan lanjutan, serta berkembangnya pendidikan kejuruan yang ditandai oleh meningkatnya jumlah tenaga terampil.

BAB III

PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memiliki peranan dominan dalam kehidupan manusia. Hasil yang ingin dicapai dalam proses pendidikan adalah terbinanya SDM sesuai dengan kebutuhan. Sasaran pembangunan di bidang pendidikan ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan. Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan antara lain ditandai oleh menurunnya jumlah penduduk buta huruf; meningkatnya secara nyata persentase penduduk yang menyelesaikan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan pendidikan lanjutan, serta berkembangnya pendidikan kejuruan yang ditandai oleh meningkatnya jumlah tenaga terampil.

Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien diharapkan mampu mengangkat kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan terbentuknya karakter bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan: 1) menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan 2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja. Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang pendidikan diantaranya adalah peningkatan akses pendidikan kualitas guru, pengelola dan layanan sekolah.

Angka Melek Huruf (AMH)

Kata “melek huruf” dapat diartikan sebagai kemampuan untuk dapat membaca dan menulis huruf latin/lainnya pada tingkat yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain atau dapat menyampaikan idenya dalam masyarakat yang mampu baca tulis. AMH merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan bidang pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia suatu daerah.

Kemampuan baca tulis penduduk dewasa merupakan ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan yang tercermin dari data angka melek huruf, yaitu persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca huruf latin dan huruf

lainnya. Pada 2020, persentase penduduk yang melek huruf sudah mencapai 99,24 persen namun angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 yaitu 99,42 persen. Sementara itu 0,76 persen penduduk lainnya buta huruf.

Tabel 3.1 Persentase Penduduk Kota Pagar Alam Berusia 15+ Menurut Kemampuan Baca Tulis (Melek/Buta Huruf) dan Kelompok Umur, 2019-2020

Kelompok Umur Penduduk Usia 15+	Melek Huruf		Buta Huruf	
	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15-19	100,00	100,00	0,00	0,00
20-24	100,00	100,00	0,00	0,00
25-29	100,00	100,00	0,00	0,00
30-34	100,00	99,70	0,00	0,30
35-39	100,00	100,00	0,00	0,00
40-44	100,00	99,70	0,00	0,30
45-49	100,00	100,00	0,00	0,00
50+	97,81	97,40	2,19	2,60
Jumlah	99,42	99,24	0,58	0,76

Sumber: Susenas (BPS), 2019-2020

Berdasarkan Tabel 3.1, jika dilihat menurut kelompok umur, mayoritas penduduk usia produktif (15-49 tahun) sudah melek huruf. Penduduk yang masih buta huruf berada pada kelompok usia tua yaitu 50 tahun ke atas. Hal ini disebabkan akses pendidikan saat masa produktif mereka yang masih kurang baik, sehingga beberapa dari kelompok umur ini belum mendapat kesempatan untuk mengakses pendidikan membaca maupun menulis.

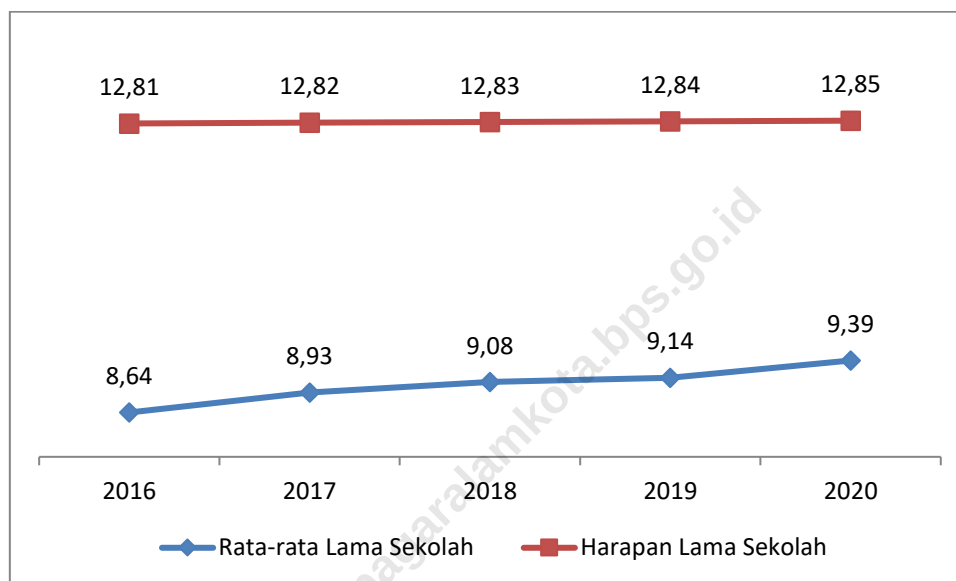
Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. RLS secara umum menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk usia 15 tahun ke atas.

Berdasarkan Gambar 3.1 dapat dilihat bahwa rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Pagar Alam mengalami kenaikan bertahap setiap tahunnya selama 5 tahun terakhir. Pada 2016, rata-rata lama sekolah sebesar 8,64 tahun menunjukkan bahwa saat itu rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas hanya mampu menyelesaikan pendidikan

sampai kelas 2 SMP/ sederajat, sedangkan pada tahun 2020 angka rata-rata lama sekolah sudah meningkat menjadi 9,39 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas sudah berhasil menyelesaikan pendidikan hingga lulus SMP/ sederajat. Namun angka ini masih jauh dari program wajib belajar yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu selama 12 tahun.

Gambar 3.1 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kota Pagar Alam, 2016-2020



Sumber: Susenas (BPS), 2016-2020

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. HLS Kota Pagar Alam pada tahun 2020 sebesar 12,85 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2020 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,85 tahun atau setara dengan Diploma I.

Tingkat Pendidikan

Gambaran mengenai peningkatan sumber daya manusia (SDM) dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas. Rendahnya pendidikan di

Indonesia membuat Indonesia memiliki krisis SDM yang berkualitas. Salah satu penyebabnya adalah masih belum meratanya pendidikan di negara kita.

Tabel 3.2. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan, 2016-2020

Tingkat Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tidak punya ijazah	9,52	9,51	11,40	8,73	12,14
SD/ sederajat	40,86	24,50	25,54	26,79	23,32
SMP/ sederajat	13,60	21,75	21,02	22,47	19,56
SMA/ sederajat/ ke atas	36,02	44,24	42,04	42,01	44,97

Sumber: Susenas (BPS), 2016-2020

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas, mayoritas penduduk Kota Pagar Alam sudah menempuh pendidikan minimum 9 tahun yakni tamat SMP/ sederajat. Adapun di tahun 2020, penduduk yang berpendidikan terakhir SD/ sederajat sebesar 23,32 persen. Persentase penduduk yang tidak memiliki ijazah kembali meningkat menjadi 12,14 persen, setelah turun pada tahun 2019 sebesar 8,73 persen. Namun penduduk yang memiliki ijazah SMA/ sederajat dan Perguruan Tinggi mengalami kenaikan yang cukup besar dibandingkan tahun 2019 yaitu 44,97 persen.

Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) didefinisikan sebagai proporsi anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Namun, meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut kelompok umur disajikan pada Tabel 3.3. Pada tahun 2020, sebanyak 99,18 persen penduduk usia 7-12 tahun bersekolah sementara 0,72 persen lainnya tidak bersekolah. Selanjutnya 97,43 penduduk pada kelompok usia 13-15 tahun bersekolah dan 2,57 persen lainnya tidak. Sedangkan pada kelompok umur 16-18

tahun, hanya terdapat 74,26 persennya saja yang bersekolah sementara 25,74 persen lainnya tidak bersekolah. Angka Partisipasi Sekolah yang semakin menurun seiring umur penduduk menunjukkan bahwa banyak penduduk yang tidak menyelesaikan pendidikan 12 tahun sesuai himbauan pemerintah. Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia 16-18 tahun perlu menjadi perhatian untuk menciptakan SDM yang lebih berkualitas di masa yang akan datang.

Tabel 3.3 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur, 2016-2020

Kelompok Umur	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7-12 tahun	100,00	100,00	99,28	99,54	99,18
13-15 tahun	98,10	97,49	97,90	97,01	97,43
16-18 tahun	69,20	68,32	74,69	73,77	74,26

Sumber: Susenas (BPS), 2016-2020

Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika $APM = 100$, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. Perhitungan APM diperoleh dari proporsi partisipasi penduduk kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun di masing-masing jenjang pendidikan SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat. Tetapi APM memiliki kelemahan yaitu tidak dapat menggambarkan anak yang sekolah di luar kelompok umur di suatu jenjang seperti anak usia 5-6 tahun dan di atas 12 tahun yang masih bersekolah di SD/ sederajat.

APM jenjang SD/ sederajat di Kota Pagar Alam pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu menjadi 98,89. APM jenjang SMP/ sederajat juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 88,67. Sementara itu APM jenjang SMA/ sederajat mengalami kenaikan menjadi sebesar 67,22. Hal ini cukup baik karena mengindikasikan bahwa telah terbentuk kesadaran masyarakat untuk

menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan umurnya dan tepat waktu, meskipun pada persentasenya terdapat penurunan.

Tabel 3.4 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan, 2016-2020

Kelompok Umur	2016		2017		2018		2019		2020	
	APM	APK	APM	APK	APM	APK	APM	APK	APM	APK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
SD/ sederajat	99,08	115,77	100,00	115,56	99,28	109,88	99,33	113,01	98,89	111,27
SMP/ sederajat	93,97	97,13	91,13	91,94	88,31	90,52	88,34	93,45	88,67	95,06
SMA/ sederajat	64,95	95,82	65,33	79,56	67,27	85,01	66,61	81,37	67,22	84,01

Sumber: Susenas (BPS), 2016-2020

Angka Partisipasi Kasar (APK) mengukur tingkat partisipasi sekolah setiap jenjang pendidikan tanpa melihat umur. Meskipun APK merupakan angka kasar dan cenderung lebih tinggi dibanding APS dan APM, ukuran ini masih sering dipakai untuk melihat banyaknya anak yang masuk sekolah tidak tepat waktu. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Berdasarkan Tabel 3.4, selisih nilai APM dan APK yang cukup besar, menunjukkan bahwa Kota Pagar Alam mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Dengan kata lain banyak penduduk yang masih bersekolah di luar usia yang sesuai dengan jenjang pendidikannya.

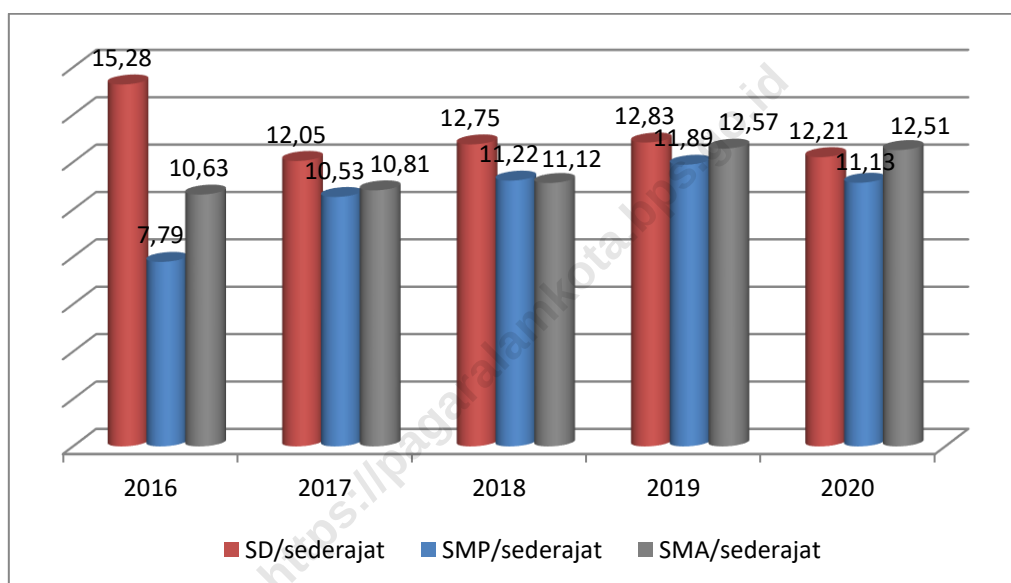
Kualitas Pendidikan

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pemerataan dan perluasan akses pendidikan adalah rasio murid-guru dan rasio murid-sekolah. Hal ini merupakan perbandingan antara jumlah murid dibandingkan dengan jumlah guru pada setiap jenjang pendidikan. Rasio murid-guru dapat memberikan gambaran besarnya beban guru dalam mengajar, sehingga apabila rasio murid-guru semakin tinggi maka semakin

banyak siswa yang harus dididik oleh seorang guru. Sedangkan rasio murid-sekolah menggambarkan daya tampung siswa dalam satu sekolah. Semakin tinggi rasio murid sekolah maka semakin banyak jumlah siswa dalam satu sekolah.

Data rasio murid-guru dan rasio murid-sekolah diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama Kota Pagar Alam dimana jenjang SD/Sederajat terdiri dari SD dan Madrasah Ibtidaiyah, SMP/ sederajat terdiri dari SMP, Madrasah Tsanawiyah, dan SMPLB, SMA/ Sederajat termasuk SMA, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan SLB.

Gambar 3.2 Perkembangan Rasio Murid-Guru Tahun Ajaran, 2016-2020



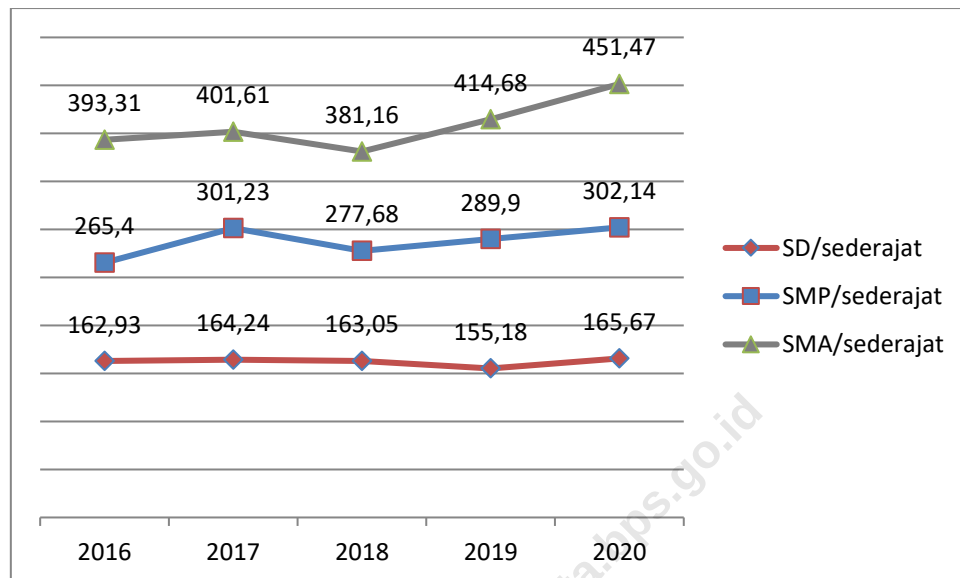
Sumber: Dinas Pendidikan, Kota Pagar Alam

Selama kurun waktu 2016 sampai 2019, rasio murid-guru SD menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2016 rasio murid-guru SD tercatat sebesar 15,28 dan menurun tajam menjadi 12,05. Di tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan menjadi 12,75 dan 12,83. Selanjutnya pada 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 12,21. Selanjutnya rasio murid-guru SMP selama empat tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Dari 7,79 di tahun 2016 menjadi 11,89 pada tahun 2019. Namun pada 2020 mengalami penurunan menjadi 11,13. Sementara rasio murid-guru SLTA/ sederajat juga menunjukkan kenaikan pada 2020 menjadi 12,51.

Selain rasio murid-guru, indikator lain untuk melihat kualitas pendidikan adalah rasio murid-sekolah. Rasio murid-sekolah merupakan perbandingan jumlah murid dengan

jumlah sekolah. Indikator ini mampu menggambarkan daya tampung sekolah di Pagar Alam sekaligus menggambarkan ketersediaan fasilitas gedung sekolah di Pagar Alam.

Gambar 3.3 Perkembangan Rasio Murid-Sekolah Tahun Ajaran 2016-2020



Sumber: Dinas Pendidikan, Kota Pagar Alam

Berdasarkan gambar 3.3 tampak bahwa rasio murid-sekolah cenderung fluktuatif pada 2016-2020. Pada tahun 2016 sampai 2019 rasio murid-sekolah SD/Sederajat terus menurun, namun pada 2020 meningkat menjadi 165,67. Sementara itu rasio murid-sekolah SMP/serata dan SMA/serata memiliki tren yang mirip yaitu mengalami penurunan pada 2017 dan 2018, namun setelah itu kembali meningkat di tahun 2019 dan 2020. Rasio murid-sekolah SMP/serata dan SMA/serata pada 2020 masing-masing sebesar 302,14 dan 451,47.



<https://pagaralamkota.bps.go.id>

BAB IV

KETENAGAKERJAAN

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Ketersediaan angkatan kerja laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan pada tahun 2020

TPAK 66,35
gabungan



Tingkat Pengangguran Terbuka

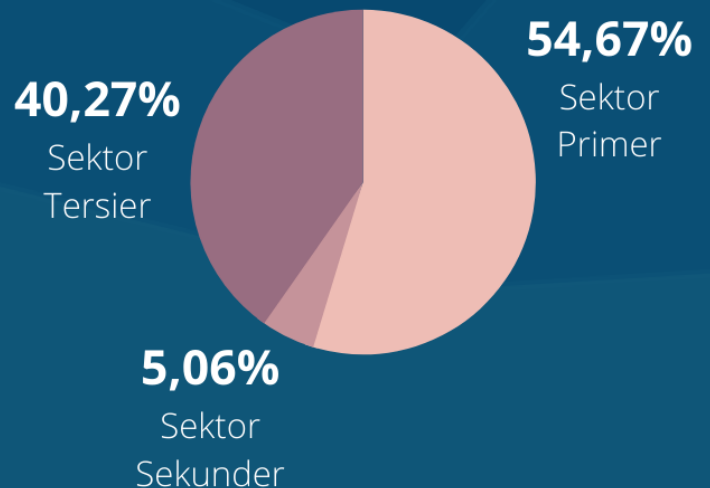


2,50

2 sampai 3 orang penduduk angkatan kerja adalah pengangguran pada tahun 2020

Lapangan Usaha Utama

Pada 2020, lapangan usaha di Kota Pagar Alam masih didominasi oleh Sektor Primer yaitu pertanian



BAB IV

KETENAGAKERJAAN

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting yang menunjukkan kesejahteraan masyarakat dan perkembangan perekonomian suatu daerah. Data dan indikator ketenagakerjaan menggambarkan bagaimana kemampuan perekonomian suatu daerah dalam menyediakan lapangan kerja bagi penduduknya yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dan penurunan angka kemiskinan. Selain itu, dari data ketenagakerjaan juga dapat menunjukkan struktur perekonomian suatu daerah, dimana hal tersebut merupakan salah satu indikator kemajuan perekonomian daerah tersebut.

Tenaga kerja menurut UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Pada suatu kelompok masyarakat, sebagian besar dari mereka, utamanya telah memasuki usia kerja diharapkan terlibat dalam lapangan kerja tertentu atau aktif dalam kegiatan perekonomian. Di Indonesia, usia kerja yang digunakan untuk keperluan pengumpulan data ketenagakerjaan adalah usia 15 tahun atau lebih.

Konsep/definisi ketenagakerjaan yang digunakan BPS merujuk pada rekomendasi International Labour Organization (ILO) sebagaimana tercantum dalam buku *"Surveys of Economically Active Population, Employment, Unemployment and Underemployment"* An ILO Manual on Concepts and Methods ILO 1992. Hal ini dimaksudkan terutama agar data ketenagakerjaan yang dihasilkan dari berbagai survei di Indonesia dapat dibandingkan secara internasional, tanpa mengesampingkan kondisi ketenagakerjaan spesifik di Indonesia. Menurut konsep *Labor Force Framework*, penduduk dibagi dalam beberapa kelompok. Kelompok-kelompok tersebut dapat digambarkan dalam Diagram Ketenagakerjaan dibawah ini.

Gambar 4.1 Diagram Ketenagakerjaan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)



Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan

pengangguran. Sedangkan Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah proporsi penduduk usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja, yakni mereka yang bekerja dan menganggur. Makin tinggi angka TPAK merupakan indikasi meningkatnya kecenderungan penduduk usia ekonomi aktif untuk mencari pekerjaan atau melakukan kegiatan ekonomi. Jumlah penduduk usia kerja, kebutuhan penduduk untuk bekerja, dan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan demografis merupakan besaran-besaran yang memengaruhi angka TPAK. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Tabel 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin, 2017-2020

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	85,13	58,17	77,99
2018	84,54	58,62	71,92
2019	82,59	55,51	69,39
2020	71,20	61,26	66,35

Sumber: Sakernas (BPS), 2017-2020

Tabel 4.1 menunjukkan perkembangan TPAK di Kota Pagar Alam periode tahun 2017-2020. Berdasarkan table di atas, terlihat bahwa tren TPAK total mengalami penurunan setiap tahunnya. Menurunnya TPAK mengindikasikan bahwa semakin rendah pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk membangun perekonomian. Selama 4 tahun terakhir, TPAK penduduk laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan TPAK penduduk perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa di Kota Pagar Alam penduduk laki-laki lebih aktif bekerja dibandingkan penduduk perempuan, sejalan dengan kultur budaya di Indonesia bahwa laki-laki lebih bertanggung jawab mencari nafkah dibanding perempuan.

TPAK penduduk laki-laki selama 4 tahun terakhir terus mengalami penurunan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan oleh bertambahnya jumlah penduduk usia kerja, namun jumlah penduduk yang bekerja tetap. Pada tahun 2020, TPAK laki-laki mencapai 71,20 berarti dari

100 orang penduduk laki-laki angkatan kerja, 71 orang merupakan angkatan kerja. Sementara 29 orang lainnya bukan angkatan kerja (melakukan aktivitas lain seperti mengurus rumah tangga, sekolah, lainnya).

TPAK penduduk perempuan selama 4 tahun terakhir cenderung lebih fluktuatif, dimana pada tahun 2020 terjadi kenaikan yang cukup signifikan yaitu 61,26. Kenaikan ini dapat menjadi sinyal awal bahwa penduduk perempuan di Kota Pagar Alam sudah mulai banyak yang bekerja. Artinya pada tahun 2020 dari 100 orang penduduk perempuan berusia 15 tahun ke atas sebanyak 61 orang merupakan penduduk angkatan kerja, sementara 39 lainnya bukan angkatan kerja (melakukan aktivitas lain seperti mengurus rumah tangga, sekolah, lainnya).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Salah satu isu penting dalam ketenagakerjaan, disamping keadaan angkatan kerja (*economically active population*) dan struktur ketenagakerjaan adalah isu pengangguran. Pengangguran dari sisi ekonomi merupakan produk dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Ketersediaan lapangan kerja yang relative terbatas tidak mampu menyerap 'para pencari kerja' yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Angka pengangguran yang tinggi tidak hanya menimbulkan berbagai masalah di bidang ekonomi saja melainkan juga menimbulkan berbagai masalah di bidang sosial seperti kemiskinan dan kerawanan sosial (BPS, 2009).

Pengangguran terbuka (*open unemployment*) adalah penduduk yang masuk dalam angkatan kerja (15 tahun keatas) yang sedang mencari pekerjaan (belum bekerja), penduduk sedang mempersiapkan usaha (tidak bekerja), penduduk yang sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, serta penduduk yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa).

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena

merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tabel 4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin, 2017-2020

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	2,28	3,03	2,57
2018	2,95	3,14	3,03
2019	1,93	3,26	2,45
2020	2,60	2,39	2,50

Sumber: Sakernas (BPS), 2017-2020

Berdasarkan table 4.2 dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pagar Alam cenderung fluktuatif. TPT total pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang cukup signifikan hingga menyentuh angka 3,03 namun 2 tahun setelahnya kembali turun ke angka 2. TPT pada 2019 dan 2020 masing-masing adalah 2,45 dan 2,50. Angka ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai TPT nasional yaitu 7,07 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan kesempatan kerja di Kota Pagar Alam masih cukup tinggi.

Jika dilihat angka berdasarkan jenis kelamin, TPT penduduk laki-laki selalu lebih rendah dibandingkan TPT penduduk perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja laki-laki lebih tinggi dari pada wanita. Namun dilihat dari selisihnya yang tidak terlalu signifikan menunjukkan bahwa tidak terlalu ada perbedaan antara kesempatan kerja laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2020, TPT laki-laki dan perempuan masing-masing adalah 2,60 dan 2,39, artinya dari 100 penduduk angkatan kerja 2 diantaranya adalah pengangguran (sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, putus asa tidak bekerja, atau sudah mendapat pekerjaan namun belum mulai bekerja).

Lapangan Usaha Utama

Data tentang distribusi sektoral, penyebaran tenaga kerja dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat kemampuan sektor-sektor ekonomi dalam menyerap tenaga kerja dan juga sebagai tolak ukur kemajuan perekonomian suatu daerah. Tahapan kemajuan perekonomian suatu negara dari tradisional menuju negara industri, salah

satunya ditandai dengan adanya transformasi sektoral tenaga kerja dari sektor primer dengan produktivitas rendah ke sektor-sektor dengan produktivitas lebih tinggi yaitu sektor sekunder dan tersier. Oleh karena itu, persentase tenaga kerja di sektor primer akan menurun dan sebaliknya pada sektor sekunder dan tersier akan meningkat.

Tabel 45.3 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama, 2017-2020

Tahun	Primer	Sekunder	Tersier
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	47.43	6.49	46.08
2018	44.57	6.26	49.17
2019	45.04	11.02	43.94
2020	54.67	5.06	40.27

Sumber: Sakernas (BPS), 2017-2020

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa proporsi penduduk yang bekerja di sektor primer (pertanian) masih sangat mendominasi yaitu 54,67 persen pada tahun 2020. Setelah sektor primer, sektor yang cukup banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor tersier (jasa) yaitu 40,27 persen pada 2020. Sedangkan untuk lapangan usaha sektor sekunder (industri) pada 2019 sempat mengalami kenaikan pada angka 11,02 persen namun pada 2020 kembali turun signifikan menjadi 5,06 persen.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa perekonomian Kota Pagar Alam masih sangat bergantung pada sektor primer yang dalam hal ini adalah pertanian. Sementara itu untuk mendongkrak perekonomian diperlukan transformasi sektoral tenaga kerja dari sektor primer dengan produktivitas rendah ke sektor-sektor dengan produktivitas lebih tinggi yaitu sektor sekunder dan tersier. Hal ini dapat menjadi pertimbangan untuk pemerintah agar mengefisienkan tenaga kerja yang ada ke dalam sektor lapangan usaha yang lebih produktivitasnya lebih tinggi.

Status Pekerjaan

Data pekerja menurut status pekerjaan sering digunakan untuk melihat banyaknya pekerja di sektor informal. Pekerja sektor informal adalah pekerja dengan status berusaha

sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja keluarga, serta pekerja bebas di sektor pertanian dan non pertanian.

Tabel 4.4 di bawah menyajikan distribusi persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan pada tahun 2020. Data hasil Sakernas 2020 tersebut menunjukkan proporsi penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, pekerja keluarga, serta pekerja bebas di sektor pertanian dan non pertanian.

Tabel 4.4 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, 2020

Status Pekerjaan	Persentase
(1)	(2)
Berusaha Sendiri	19,87
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	21,84
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	3,34
Buruh/karyawan/pegawai	19,89
Pekerja bebas di pertanian	6,69
Pekerja bebas di non pertanian	3,59
Pekerja keluarga/tak dibayar	24,79

Sumber: Sakernas (BPS), 2020

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa status pekerjaan yang mendominasi di Kota Pagar Alam pada 2020 adalah Pekerja keluarga/tak dibayar dan Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar. Pekerja keluarga/tak dibayar sebesar 24,79 persen didominasi oleh pekerja keluarga di sektor pertanian, hal ini sejalan dengan kultur budaya masyarakat kota Pagar Alam yang sebagian besar bekerja mengurus lahan dengan dibantu oleh keluarga sendiri baik itu istri ataupun anak. Selain itu juga status pekerjaan kedua yang mendominasi adalah berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar yaitu 21,84 persen, hal ini pula sejalan dengan status pekerjaan yang pertama yaitu pekerja keluarga/tidak dibayar sebagai tenaga kerja yang dipekerjakan.

Keberadaan dan kelangsungan sektor informal dalam system ekonomi bukanlah gejala negative, namun lebih sebagai realita ekonomi kerakyatan yang berperan cukup

penting dalam pengembangan masyarakat dan pembangunan nasional. Setidaknya, ketika program pembangunan kurang mampu menyediakan peluang bagi angkatan kerja, sektor informal dengan segala kekurangannya mampu berperan sebagai penampung dan alternatif peluang kerja bagi para pencari kerja.

Jumlah Jam Kerja

Aspek lain dari ketenagakerjaan adalah pemanfaatan tenaga kerja yang umumnya diukur dengan jam kerja. Isu jam kerja ini biasanya dihubungkan dengan setengah pengangguran atau pengangguran terselubung yaitu penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (35 jam dalam seminggu). Hal ini karena dianggap mereka belum menggunakan seluruh kapasitas sumber daya yang ada seperti tingkat pendidikan, *skill*, dan keterampilan yang dimiliki atau tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang diharapkan sehingga mereka masih berusaha mendapatkan pekerjaan lain.

Tabel 4.5 Persentase Penduduk yang Bekerja Kurang dari 35 Jam seminggu, 2020

Penduduk Bekerja	Persentase
(1)	(2)
Laki-laki	28,78
Perempuan	42,02
Laki-laki + Perempuan	34,75

Sumber: Sakernas (BPS), 2020

Dari tabel 4.5 terlihat bahwa sebesar 34,75 persen pekerja di Kota Pagar Alam bekerja di bawah jam kerja normal, yaitu kurang dari 35 jam dalam seminggu. Adapun jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk perempuan yang bekerja di bawah 35 jam seminggu (42,02 persen) lebih tinggi dibandingkan laki-laki (28,78 persen). Hal ini sejalan dengan status pekerjaan yang dominan yaitu pekerja keluarga/tak dibayar, dimana pekerja dengan status ini tidak terikat dengan jadwal jam kerja.

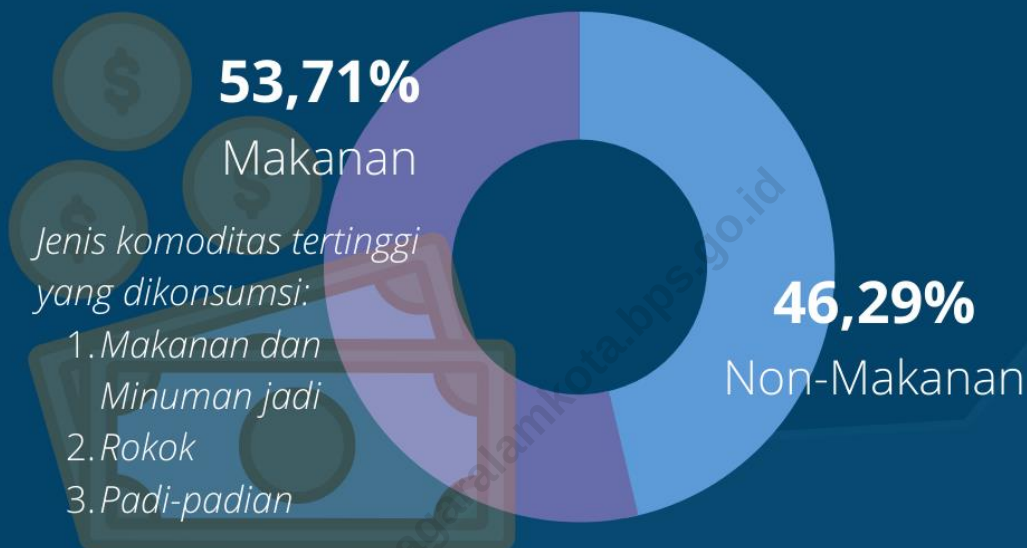


<https://pagaralamkota.bps.go.id>

BAB V

TARAF DAN POLA KONSUMSI

Pengeluaran per kapita



Konsumsi Energi dan Protein per kapita

Energi
2.141,27 kkal
**kecukupan energi
2000 kkal/hari*

Protein
59,68 gram
**kecukupan protein
52 gram/hari*

Semakin tinggi proporsi pengeluaran untuk kebutuhan non makanan semakin sejahtera penduduk di wilayah tersebut.

BAB V

TARAF DAN POLA KONSUMSI

Berkurangnya jumlah penduduk miskin mencerminkan bahwa secara keseluruhan kemampuan ekonomi khususnya pendapatan penduduk meningkat sedangkan meningkatnya jumlah penduduk miskin mengindikasikan menurunnya kemampuan ekonomi penduduk. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang cukup baik untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat.

Aspek lain yang perlu dipantau berkenaan dengan peningkatan pendapatan penduduk tersebut adalah bagaimana pendapatan tersebut terdistribusi diantara kelompok penduduk. Indikator pendapatan (dalam hal ini didekati dengan pengeluaran) akan memberikan petunjuk aspek pemerataan yang telah tercapai. Dari data pengeluaran dapat juga diungkapkan tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum dengan menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan.

Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga juga merupakan indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau di tabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Semakin tinggi proporsi pengeluaran untuk kebutuhan non makanan semakin sejahtera penduduk di wilayah tersebut.

Tabel 5.1 Persentase Pengeluaran Per Kapita Masyarakat, 2016-2020

Tahun	Komoditas Makanan	Komoditas Non Makanan
(1)	(2)	(3)
2016	53,21	46,79
2017	54,14	45,86
2018	55,31	44,69
2019	54,91	45,09
2020	53,71	46,29

Sumber: Susenas (BPS), 2016-2020

Berdasarkan tabel 5.1 terlihat bahwa persentase pengeluaran untuk makanan pada tahun 2020 sebesar 53,71 persen, sementara itu pengeluaran non makanan sebesar 46,29 persen. Secara umum, persentase konsumsi makanan per kapita di Pagar Alam lebih besar dibanding non makanan selama lima tahun terakhir. Sejak 2019 terjadi pergeseran proporsi konsumsi makanan dan non makanan, dimana proporsi konsumsi makanan semakin menurun dan non makanan semakin meningkat. Hal ini dapat menjadi sinyal awal bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Pagar Alam meningkat.

Di samping peningkatan pendapatan, aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial.

Penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan. Walaupun hal ini tidak dapat mencerminkan keadaan sebenarnya, namun paling tidak dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi.

Terdapat dua indikator utama yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan. Indikator pertama adalah indikator yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Indikator ini mengukur tingkat pemerataan pendapatan dengan memperhatikan persentase pendapatan yang diterima 40 persen penduduk berpendapatan rendah. Tingkat

ketimpangan pendapatan penduduk ini digambarkan oleh porsi pendapatan dari kelompok pendapatan ini terhadap seluruh pendapatan penduduk yang digolongkan sebagai berikut:

- Memperoleh <12 persen, tingkat ketimpangan dianggap tinggi,
- Memperoleh 12-17 persen, tingkat ketimpangan dianggap sedang,
- Memperoleh >17 persen, tingkat ketimpangan dianggap rendah.

Tabel 5.2 Distribusi Pembagian Pengeluaran Masyarakat dan Gini Rasio, 2016-2020

Tahun	Distribusi Pengeluaran			
	40 persen terendah	40 persen menengah	20 persen tertinggi	Gini Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2016	18,58	37,91	43,5	0,36
2017	18,24	37,82	43,94	0,37
2018	21,24	40,09	38,67	0,30
2019	19,56	39,61	40,82	0,33
2020	20,75	35,49	43,76	0,34

Sumber: Susenas (BPS), 2016-2020

Tabel 16 menunjukkan bahwa pada periode 2016-2020, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kota Pagar Alam tergolong rendah. Di tahun 2020 persentase kelompok dengan distribusi pengeluaran 40 persen terendah adalah 20,75 persen, mengalami kenaikan sebesar 1,19 persen dari tahun 2019. Kelompok 40 persen menengah juga mengalami penurunan sebesar 4,12 persen pada tahun 2020 menjadi sebesar 35,49 persen. Penurunan yang cukup besar pada kelompok 40 persen menengah ini berakibat pada meningkatnya persentase kelompok pengeluaran 20 persen tertinggi sebesar 2,94 persen menjadi 43,76 persen.

Selain kriteria yang ditetapkan oleh Bank Dunia dapat juga dipergunakan indikator yang lain yaitu *Gini Ratio*. *Gini Ratio* juga dihitung dengan memanfaatkan data pengeluaran. Nilai dari *Gini Ratio* berkisar dari 0 sampai 1. Semakin mendekati 0 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin rendah, sebaliknya semakin mendekati 1 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok semakin tinggi. Berdasarkan *gini ratio*, sejak 2018 hingga 2020 ketimpangan di Kota Pagar

Alam meningkat setiap tahunnya ditunjukkan dengan angka *gini ratio* yang meningkat dari 0,30 pada 2018 menjadi 0,34 pada 2020.

Taraf Konsumsi Energi dan Protein

Salah satu indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk adalah tingkat kecukupan gizi yang disajikan dalam unit kalori dan protein. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap komoditas makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap komoditas makanan tersebut. Kecukupan energi dan protein untuk tingkat konsumsi sehari-hari berdasarkan Widyakarya Pangan dan Gizi (WNPG) VIII tahun 2004 masing-masing sebesar 2000 kkal dan 52 gram protein.

Tabel 5.3 Konsumsi Energi, Protein Per Kapita Per Hari, dan Rata-Rata Konsumsi per Kapita, 2016-2020

Tahun	Konsumsi Kalori (kkal/kapita/hari)	Konsumsi Protein (gram/kapita/hari)	Rata-Rata Konsumsi per Kapita (rupiah/bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	2002,18	54,52	777.880
2017	2377,15	67,12	883.028
2018	2250,37	61,80	826.719
2019	2400,10	68,65	887.291
2020	2141,27	59,68	894.536

Sumber: Susenas (BPS), 2016-2020

Pada tahun 2020, besarnya rata-rata konsumsi energi masyarakat Kota Pagar Alam sebesar 2.141,27 kkal per kapita per hari. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 2.400,10 kkal per kapita per hari. Meskipun mengalami penurunan, angka ini masih mencukupi standar kecukupan gizi menurut WNPG VIII.

Konsumsi protein pada 2020 mencapai 59,68 gram per kapita per hari. Angka ini juga mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan 2019 yang mencapai 68,65 gram per kapita per hari. Sama halnya dengan konsumsi kalori, meskipun mengalami penurunan angka konsumsi protein rata-rata penduduk Kota Pagar Alam masih di atas standar kecukupan gizi menurut WNPG VIII.

Perkembangan rata-rata konsumsi per kapita selama 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Pada 2016 rata-rata konsumsi per kapita merupakan yang terendah yaitu mencapai Rp777.880 per kapita per bulan. Seiring berjalannya waktu kemudian mengalami kenaikan perlahan hingga pada tahun 2020 mencapai angka tertingginya yaitu Rp894.536 per kapita per bulan. Kenaikan rata-rata konsumsi per kapita ini menunjukkan adanya kenaikan tingkat kesejahteraan penduduk di Kota Pagar Alam.

Tabel 5.4 Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang Makanan Penduduk Kota Pagar Alam (Rupiah), 2020

Komoditas Makanan	Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan (rupiah)
(1)	(2)
Padi-padian	69.411
Umbi-umbian	3.204
Ikan	31.836
Daging	24.953
Telur dan Susu	24.819
Sayur-sayuran	51.969
Kacang-kacangan	8.363
Buah-buahan	25.574
Minyak dan Lemak	10.776
Bahan Minuman	18.899
Bumbu-bumbuan	10.841
Konsumsi Lainnya	11.630
Makanan dan Minuman Jadi	112.942
Tembakau dan Sirih	75.231

Sumber: Susenas (BPS), 2020

Berdasarkan Tabel 5.4, dapat dilihat distribusi pengeluaran penduduk berdasarkan kelompok barang makanan. Pengeluaran tertinggi berasal dari makanan dan minuman jadi yaitu sebesar Rp112.942 per kapita per bulan. Komoditas barang makanan yang tertinggi selanjutnya adalah Tembakau dan Sirih sebesar Rp75.231 per kapita per bulan, dan padi-padian sebesar Rp69.411 per kapita per bulan. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah porsi komoditas tembakau dan sirih yang cukup tinggi, karena tembakau dan sirih atau

rokok tidak memiliki nilai kalori. Sehingga meskipun nilai rata-rata pengeluaran penduduk tinggi, nilai konsumsi kalori rata-rata akan cenderung rendah.

<https://pagaralamkota.bps.go.id>



<https://pagaralamkota.bps.go.id>

BAB VI

PERUMAHAN DAN SANITASI

74,07
persen

penduduk tinggal
di rumah milik
sendiri

99,95
persen

menggunakan
listrik sebagai
sumber
penerangan

56,81
persen

memiliki akses
air bersih

46,45
persen

memiliki jamban
sendiri dengan
tangki septik

Rumah digunakan sebagai tempat berlindung terhadap gangguan dari luar dan sebagai tempat tinggal sehari-hari penghuninya yaitu sebagai tempat untuk tumbuh, hidup berinteraksi, dan fungsi lainnya.

BAB VI

PERUMAHAN DAN SANITASI

Kebutuhan akan perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok setiap orang. Arti fisik perumahan/pemukiman yaitu tempat tinggal anggota masyarakat dan individu-individu yang biasanya hidup dalam ikatan perkawinan atau keluarga dengan berbagai fasilitas pendukungnya. Rumah digunakan sebagai tempat berlindung terhadap gangguan dari luar dan sebagai tempat tinggal sehari-hari penghuninya yaitu sebagai tempat untuk tumbuh, hidup berinteraksi, dan fungsi lainnya. Oleh karena itu rumah diharapkan mampu memberikan rasa nyaman bagi penghuninya dan harus memenuhi syarat-syarat Kesehatan.

Data keadaan perumahan sangat penting terutama untuk menggambarkan salah satu dimensi kesejahteraan rumah tangga. Beberapa aspek yang dapat digambarkan dari data fasilitas perumahan antara lain adalah kelayakan dan kesehatan rumah yang pada akhirnya mempengaruhi kesehatan masyarakat, tingkat pendapatan, dan aspek-aspek lain.

Kualitas Rumah Tinggal

Rumah merupakan tempat berkumpul bagi semua anggota keluarga sebagai tempat untuk menghabiskan sebagian besar waktu. Oleh karena itu, kondisi kesehatan perumahan sangat rentan sebagai media penularan penyakit di antara anggota keluarga atau tetangga sekitar.

Berdasarkan Permenpupr RI No.29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang dimaksud dengan Rumah Layak Huni (RLH) adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Kriteria Rumah Layak Huni harus memenuhi syarat-syarat yaitu: (1) Keselamatan bangunan meliputi: struktur bawah/pondasi; struktur tengah/kolom dan balok dan struktur atas (2) Kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi (3) Kecukupan luas minimum $7,2 \text{ m}^2 - 12 \text{ m}^2/\text{orang}$.

Berdasarkan Tabel 6.1, tercatat pada tahun 2020 sebanyak 24,31 persen penduduk di Kota Pagar Alam tinggal di rumah dengan luas lantai per kapita kurang dari 10 m^2 atau masih relatif sempit. Namun angka ini telah menurun jika dibandingkan dengan 2 tahun

sebelumnya yaitu pada 2018 dan 2019. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi perumahan di Kota Pagar Alam semakin menuju pada kualitas yang lebih baik.

Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2016-2020

Tahun	Luas Lantai per Kapita < 10m ²	Lantai Bukan Tanah	Atap Layak	Dinding Permanen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2016	30,70	99,00	100,00	97,60
2017	22,87	99,13	98,33	98,32
2018	29,18	99,46	100,00	99,20
2019	27,95	99,36	100,00	98,14
2020	24,31	99,37	100,00	99,85

Sumber: Susenas (BPS), 2016-2020

Selain luas lantai, jenis lantai juga digunakan sebagai indikator untuk melihat kualitas perumahan. Semakin baik kualitas perumahan dapat diasumsikan semakin membaik tingkat kesejahteraan penduduknya. Selain itu, jenis lantai juga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Semakin banyak rumah tangga yang mendiami rumah dengan lantai tanah akan berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan masyarakat karena lantai tanah dapat menjadi media yang subur bagi timbulnya penyakit dan menjadi media penularan penyakit tertentu seperti diare, cacingan dan penyakit kulit.

Berdasarkan Tabel 6.1, selama 5 tahun terakhir persentase rumah menggunakan lantai bukan tanah sudah lebih dari 99 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas perumahan di Kota Pagar Alam sudah baik. Meskipun begitu perlu diketahui bahwa pada beberapa rumah terutama di daerah perdesaan masih terdapat sebagian lantai yang berupa tanah, seperti pada area dapur. Selain kondisi lantai, indikator kualitas perumahan yang lain adalah rumah tinggal dengan atap yang layak (tidak beratap dedaunan). Sejak 2018 hingga 2020 tercatat seluruh rumah telah memiliki atap yang layak yaitu 100 persen.

Fasilitas Rumah Tinggal

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah akan menentukan nyaman tidaknya suatu rumah tinggal, yang juga merupakan penentu kualitas suatu rumah tinggal. Fasilitas pokok

yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah tersedianya sarana penerangan listrik, air bersih serta jamban sendiri dengan tangki septik.

Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Fasilitas Perumahan, 2016-2020

Tahun	Sumber Penerangan Listrik	Air Minum Leding dan Kemasan	Air Bersih	Jamban Sendiri dengan Tangki Septik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2016	99,08	7,53	52,38	41,88
2017	97,73	4,36	53,87	33,80
2018	99,12	8,37	49,57	45,65
2019	98,45	7,36	50,22	46,34
2020	99,95	7,46	56,81	46,45

Sumber: Susenas (BPS), 2016-2020

Tabel 6.2 menyajikan perkembangan persentase rumah tangga menurut beberapa indikator fasilitas perumahan selama periode 2016-2020 di Kota Pagar Alam. Secara umum tampak bahwa persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas perumahan berupa sumber penerangan listrik sudah cukup besar yaitu di atas 97 persen. Hal ini berarti hampir seluruh rumah penduduk sudah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan. Adapun di tahun 2020 terdapat 99,95 persen rumah tinggal yang menggunakan listrik, angka ini meningkat dibandingkan tahun 2019 yaitu 98,45 persen.

Berbeda dengan persentase rumah tinggal yang menggunakan listrik, indikator fasilitas perumahan seperti air minum leding dan kemasan, air bersih, dan jamban sendiri dengan tangki septik menunjukkan angka yang cukup fluktuatif. Pada 2020 hanya 7,46 persen rumah tangga yang menggunakan leding dan air minum kemasan sebagai sumber air minum utama. Sementara itu 92,54 persen lainnya menggunakan sumber air lainnya seperti sumur bor/pompa, sumur/mata air terlindung, dan lainnya.

Pengguna air bersih pada 2020 hanya sebesar 56,81 persen. Namun angka ini sudah meningkat dibandingkan tahun 2019 yang hanya 50,22 persen. Sementara itu untuk rumah tangga yang memiliki jamban sendiri dengan tangki septik hanya sebesar 46,45 pada tahun

2020, mengalami sedikit kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan 53,55 persen rumah tangga lainnya memiliki jamban tanpa tangki septik, menggunakan fasilitas bersama seperti MCK umum, ataupun tidak menggunakan fasilitas buang air besar.

Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu pada periode 2016-2020, tercatat bahwa lebih dari 70 persen rumah tangga di Kota Pagar Alam sudah menempati rumah milik sendiri. Berdasarkan tabel 21 pada tahun 2020, tercatat sebanyak 74,07 persen rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri, sedangkan 25,93 persen sisanya menempati rumah kontrak/sewa, dinas, bebas sewa, dan lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa keadaan perekonomian masyarakat Pagar Alam sudah cukup baik sehingga sudah mampu memiliki rumah sendiri.

Tabel 6.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal, 2016-2020

Tahun	Milik Sendiri	Sewa/Kontrak	Bebas Sewa	Dinas	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2016	77,80	10,40	6,70	4,80	0,30
2017	73,90	10,00	11,10	5,00	0,00
2018	76,40	13,16	7,46	2,98	0,00
2019	78,41	8,35	10,76	2,47	0,00
2020	74,07	8,15	15,81	1,97	0,00

Sumber: Susenas (BPS), 2016-2020



<https://pagaralamkota.bps.go.id>

BAB VII

KEMISKINAN

9,07

persen

atau

sekitar **12.710**

jiwa

penduduk Kota Pagar Alam berada di bawah garis kemiskinan pada tahun 2020

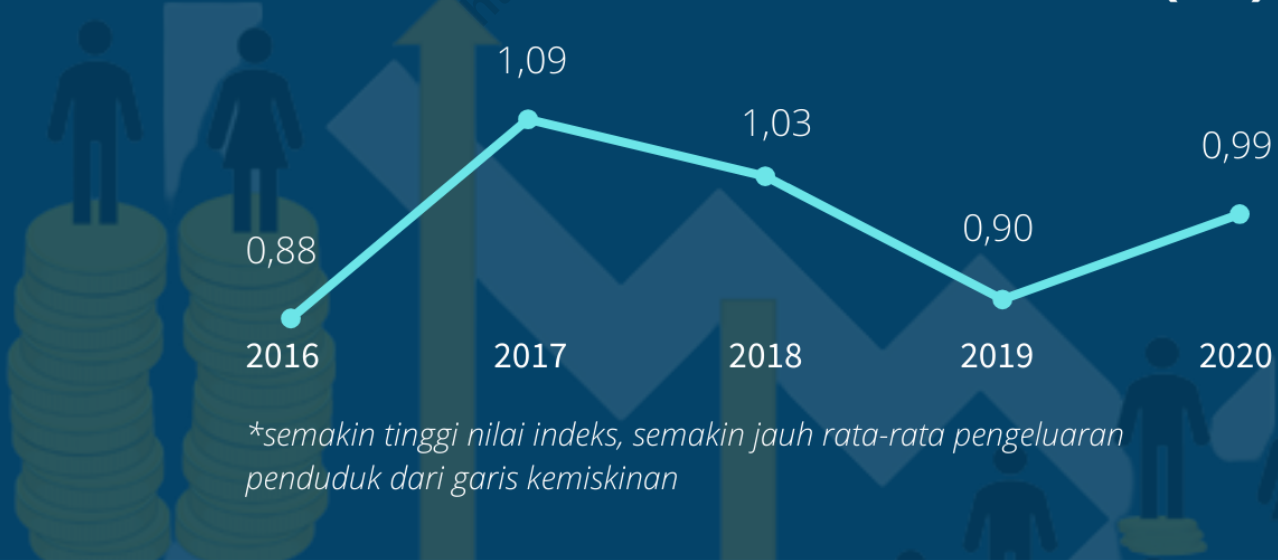
Garis Kemiskinan 2020

Rp342.738

per kapita per bulan



Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)



**semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan*

Rumah digunakan sebagai tempat berlindung terhadap gangguan dari luar dan sebagai tempat tinggal sehari-hari penghuninya yaitu sebagai tempat untuk tumbuh, hidup berinteraksi, dan fungsi lainnya.

BAB VII

KEMISKINAN

Berkurangnya jumlah penduduk miskin mencerminkan bahwa secara keseluruhan kemampuan ekonomi khususnya pendapatan penduduk meningkat sedangkan meningkatnya jumlah penduduk miskin mengindikasikan menurunnya kemampuan ekonomi penduduk. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang cukup baik untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat.

Aspek lain yang perlu dipantau berkenaan dengan peningkatan pendapatan penduduk tersebut adalah bagaimana pendapatan tersebut terdistribusi diantara kelompok penduduk. Indikator pendapatan (dalam hal ini didekati dengan pengeluaran) akan memberikan petunjuk aspek pemerataan yang telah dicapai. Dari data pengeluaran dapat juga diungkapkan tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum dengan menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan.

Perkembangan Penduduk Miskin

Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang pendapatannya (didekati dengan pengeluaran) lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup secara layak di wilayah tempat tinggalnya. Kebutuhan untuk hidup layak tersebut diterjemahkan sebagai suatu jumlah rupiah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi makanan setara 2100 kilo kalori (kkal) per kapita per hari, perumahan, pakaian, kesehatan dan pendidikan. Jumlah rupiah tersebut kemudian disebut sebagai garis kemiskinan.

Dengan analisis kemiskinan dikenal beberapa indikator penting yang dapat digunakan untuk mengukur insiden kemiskinan. Indikator yang paling sering digunakan adalah head count (P0). Ukuran ini memberikan gambaran tentang proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Indikator ini mudah dihitung dan dipahami, namun tidak dapat mengindikasikan seberapa parah/dalam tingkat kemiskinan yang terjadi. Hal ini dikarenakan ukuran ini tetap tidak berubah jika seorang yang miskin menjadi lebih miskin. oleh karena itu, dikenal juga indikator kemiskinan yang lain yaitu tingkat kedalaman

kemiskinan (*poverty gap index* atau P1) dan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity index* atau P2).

Tingkat kedalaman kemiskinan (P1) menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Akan tetapi, indeks ini tidak sensitif terhadap distribusi pendapatan di antara penduduk miskin sehingga dibutuhkan indikator lain guna mengukur tingkat keparahan kemiskinan (P2). Penurunan pada P1 mengidentifikasi adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan yang mengidentifikasi berkurangnya kedalaman insiden kemiskinan dan penurunan pada P2 mengidentifikasi berkurangnya ketimpangan kemiskinan.

Tabel 7.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Kota Pagar Alam, 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	12,40	12,12	12,07	12,37	12,71
Persentase Penduduk Miskin	9,19	8,89	8,77	8,90	9,07

Sumber: Susenas (BPS), 2016-2020

Tabel 7.1 menyajikan data perkembangan penduduk miskin di Kota Pagar Alam periode 2016-2020. Berdasarkan tabel tersebut terlihat jumlah penduduk miskin Kota Pagar Alam mengalami penurunan pada periode 2016-2018, namun selama 2 tahun terakhir yaitu 2019 dan 2020 kembali mengalami kenaikan. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa program pengentasan kemiskinan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah belum tepat sasaran. Adapun jumlah penduduk miskin pada 2018 adalah sebesar 12.070 jiwa, kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 12.370 jiwa dan pada 2020 kembali meningkat menjadi 12.171 jiwa. Sehingga dalam waktu 3 tahun terakhir jumlah penduduk miskin di Kota Pagar Alam meningkat sekitar 700 jiwa.

Indeks Kedalaman, Keparahan, dan Garis Kemiskinan

Peliknya masalah kemiskinan mendesak pemerintah untuk segera melakukan langkah-langkah nyata dalam penanggulangannya, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan nasional penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas yang paling utama. Dalam Propenas 2009-2014 telah ditargetkan bahwa persentase penduduk miskin akan dapat diturunkan menjadi sekitar 8-10 persen tahun 2014. Guna memenuhi terget tersebut, penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk membantu penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Tabel 7.2 Perkembangan Indikator Kemiskinan Di Kota Pagar Alam, 2016-2020

Indikator Kemiskinan	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,88	1,09	1,03	0,90	0,99
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,15	0,20	0,20	0,16	0,16
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	289.493	299.082	299.982	328.745	342.738

Sumber: BPS (Susenas), 2015-2020

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. P1 di tahun 2019 sebesar 0,90 persen naik menjadi 0,99 persen. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. P2 di tahun 2020 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2019 yaitu 0,16 persen. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 dan 2018 yaitu 0,20 persen. Dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin telah mengalami penurunan pada 2 tahun terakhir.

Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik



kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan yang meningkat nilainya dari tahun ke tahun merupakan efek dari adanya inflasi atau kenaikan harga bahan makanan dan non makanan.

<https://pagaralamkota.bps.go.id>



<https://pagaralamkota.bps.go.id>

BAB VIII

ASPEK SOSIAL LAINNYA

Keterbukaan Akses TIK



8 sampai 9 penduduk telah
menggunakan telepon seluler



4 sampai 5 penduduk telah
mengakses Internet

Perlindungan Sosial

11,59

Bantuan
Pangan
Non Tunai

6,84

Kartu
Keluarga
Sejahtera



6,33

Program
Indonesia
Pintar

5,91

Program
Keluarga
Harapan

BAB VIII

ASPEK SOSIAL LAINNYA

Teknologi Informasi dan Komunikasi

Adanya akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat modern saat ini. Selain sebagai indikator meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi dan komunikasi, adanya akses terhadap informasi dan komunikasi menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan rumah tangga. Beberapa indikator akses rumah tangga terhadap teknologi informasi dan komunikasi adalah kepemilikan telepon rumah, telepon seluler, komputer dan akses internet. Salah satu tantangan sekaligus peluang di era TIK data ini adalah pembangunan infrastruktur, terutama infrastruktur yang menunjang penggunaan TIK itu sendiri. Hal ini karena potensi TIK jika dikembangkan secara tepat dan optimal, akan memberikan dampak positif yang cepat dan signifikan bagi pembangunan suatu wilayah. Kemajuan tersebut tidak hanya dari aspek ekonomi melainkan berdampak pula pada pembangunan masyarakat.

Saat ini dengan perkembangan TIK, masyarakat secara umum mendapat berbagai kemudahan. Aplikasi berbasis online memberikan kesempatan pada masyarakat luas untuk aktif berperan dalam perekonomian sebagai subjek maupun objek. Terbukanya lapangan kerja baru dan industri kreatif menciptakan sebuah pasar tersendiri bagi kalangan pelaku usaha. Semakin banyak penduduk yang mampu mengakses TIK maka dipastikan peluang mendapat kesejahteraan yang lebih baik semakin terbuka.

Tabel 8.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Akses Terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi, 2016-2020

Tahun	Menggunakan Telepon Seluler	Mengakses Internet
(1)	(2)	(3)
2016	57,31	22,99
2017	63,25	25,78
2018	64,37	31,78
2019	77,22	38,75
2020	82,34	47,69

Sumber: BPS (Susenas), 2016-2020

Selama kurun waktu 2016-2020 dapat dilihat bahwa penggunaan telepon seluler di Kota Pagar Alam semakin meningkat. Pada tahun 2016 masyarakat yang menggunakan telepon seluler hanya sebanyak 57,31 persen. Sementara itu pada tahun 2020 pengguna telepon seluler sudah mencapai 82,34 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Pagar Alam sudah mendapat akses dasar TIK.

Sementara untuk persentase penduduk yang mengakses internet juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2016, pengguna internet di Kota Pagar Alam hanya sebesar 22,99 persen saja. Sedangkan pada tahun 2020 pengguna internet sudah mencapai 47,69 persen. Kenaikan yang cukup signifikan pada 2020 salah satunya merupakan dampak dari pandemi covid-19 yang menggeser sistem pendidikan dari tatap muka konvensional menjadi kegiatan pembelajaran daring.

Persentase penduduk pengguna telepon seluler dan internet yang masih terdapat selisih cukup besar ini menunjukkan bahwa penggunaan telepon seluler hanya sebatas untuk berkomunikasi secara konvensional saja misalnya telepon dan SMS. Penggunaan telepon seluler belum banyak digunakan untuk keperluan lainnya seperti mengakses berita pada media sosial. Hal ini kemungkinan juga disebabkan pada masih sulitnya kekuatan sinyal internet yang berdasarkan data potensi desa tahun 2017 hanya ada 46 *Base Transceiver Station* (BTS) di seluruh Kota Pagar Alam. Hal ini perlu menjadi perhatian, karena secara peluang ekonomi internet dapat menjadi peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Oleh karena itu sudah seharusnya sarana dan prasarana TIK harus terus dikembangkan secara merata.

Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Perlindungan sosial dibutuhkan oleh semua masyarakat terutama masyarakat dengan perekonomian menengah ke bawah. Kelompok penduduk ini terdiri dari penduduk miskin dan penduduk rentan miskin.

Banyak program perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah, baik dalam bentuk tunai maupun non tunai. Beberapa di antaranya adalah Bantuan

Pangan (BPNT/Sembako), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan Program Keluarga Harapan (PKH). Pada Tabel 25 berikut, disajikan persentase rumah tangga yang menerima program perlindungan sosial di Kota Pagar Alam tahun 2020.

Tabel 8.2. Persentase Rumah Tangga menurut jenis program perlindungan sosial yang diterima, 2018-2020

Jenis Program Perlindungan Sosial	Persentase Rumah Tangga yang Menerima		
	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Raskin/Rastra/BPNT	22,43	17,97	11,59
Program Indonesia Pintar (PIP)	11,36	9,65	6,33
Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	5,18	8,94	6,84
Program Keluarga Harapan (PKH)	4,56	3,35	5,91

Sumber: BPS (Susenas), 2018-2020

Persentase Rumah Tangga yang Menerima Program Perlindungan Sosial Raskin/Rastra/BPNT dan Program Indonesia Pintar (PIP) selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan. Jika dihubungkan dengan jumlah penduduk miskin pada 2018-2020 yang meningkat, sudah semestinya pemerintah meningkatkan persentase rumah tangga yang menerima program perlindungan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merata.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

- Enlighten The Nation -



***BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA PAGAR ALAM***

Jalan Laskar Wanita Mentarjo,
Komplek Perkantoran Gunung Gare
Pagar Wangi, Kota Pagar Alam